



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: helpdesk.lib@unsyiah.ac.id

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)

ABSTRACT

i

ABSTRAK

Muhammad Herza

2016

PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

(v, 50) pp., bibl.

Nurhafifah, S.H, M.Hum

Pasal penganiayaan ringan, yaitu pasal 352 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa Penganiayaan ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. namun dalam kenyataannya selama ini hakim sering memutuskan pidana penjara saja terhadap pelaku penganiayaan ringan, padahal pasal tersebut bersifat alternatif yaitu dapat dipilih salah satu jenis hukuman karena memuat kata "atau".

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap terpidana.

Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan karena lebih berefek jera daripada pidana denda, sebab pidana denda biaya dendanya terlalu sedikit dan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap terpidana adalah sanksinya tidak dapat langsung dijalankan karena dalam hal sidang tindak pidana ringan kekuasaan penuntut umum diserahkan kepada penyidik dan pengekskusiannya menjadi terhambat karena jaksa pengekskusi tidak hadir didalam persidangan. Namun jika pelaku tidak dapat memenuhi dendanya dapat digantikan dengan kurungan.

Diharapkan kepada hakim sebaiknya dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penganiayaan ringan lebih baik dijatuhkan sanksi pidana denda dari pada penjara. Karena dengan menjatuhkan pidana denda kepada pelaku penganiayaan ringan dapat mengurangi beban negara dan mengurangi jumlah penghuni Lembaga permasyarakatan yang selama ini penuh, serta untuk mengurangi hambatan tersebut maka sebaiknya jaksa penuntut umum juga dihadirkan kedalam persidangan agar memudahkan pengekskusi pidana denda jika mampu dan jika tidak mampu diganti dengan pidana penjara.